

2025 LAPORAN KINERJA

*Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil
Perikanan*



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
Ketua	Penanggung Jawab Tata Operasional LRMPHP
Anggota	Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi., M.Sc Naila Zulfia, S.Pi., M.Sc Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi
Kontributor	Penanggung Jawab Tata Usaha LRMPHP Penanggung Jawab Tata Operasional LRMPHP Penanggung Jawab Pelayanan Teknis LRMPHP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Di samping itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Bantul, 21 Januari 2026

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany, M.Dev.Pract.
NIP. 19830417 200901 2 002

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Potensi dan Permasalahan	5
1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025	10
2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP	12
2.4. Pengukuran Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	15
3.2.1. SK 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	16
a. IKK 1: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	16
b. IKK 2: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	18
c. IKK 3: Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	20
d. IKK 4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	22
e. IKK 5: Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	23
f. IKK 6: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	25
g. IKK 7: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	27
h. IKK 8: Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	29

i. IKK 9: Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%).....	32
j. IKK 10: Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal).....	34
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	36
3.4. Efisiensi Alokasi Sumber Daya LRMPHP	38
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan status kepegawaian	6
Grafik 2. Keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan golongan	6
Grafik 3. Keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan jabatan	7

DAFTAR TABEL

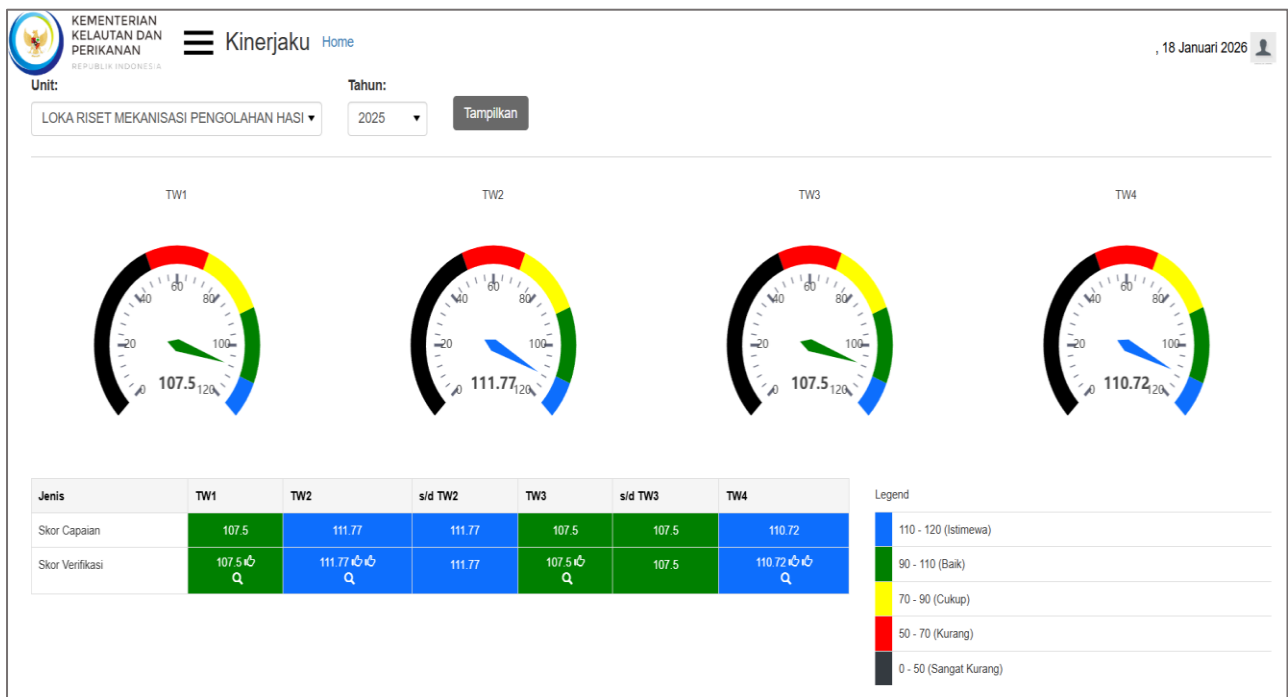
Tabel 1. Revisi DIPA LRMPHP tahun 2025	10
Tabel 2. Rencana Kerja LRMPHP tahun 2025	11
Tabel 3. Penjelasan revisi Perjanjian Kinerja LRMPHP tahun 2025	12
Tabel 4. Perjanjian Kinerja LRMPHP tahun 2025	13
Tabel 5. Matriks capaian IKK LRMPHP tahun 2025	16
Tabel 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP	17
Tabel 7. Perbandingan persentase rekomendasi hasil pengawasan	18
Tabel 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	18
Tabel 9. Perbandingan IKPA dengan satker setingkat loka	20
Tabel 10. Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	20
Tabel 11. Hasil penilaian mandiri SAKIP LRMPHP tahun 2025	21
Tabel 12. Perbandingan PM SAKIP dengan satker setingkat loka	22
Tabel 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	22
Tabel 14. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan satker setingkat loka	23
Tabel 15. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	24
Tabel 16. Perbandingan IP ASN dengan satker setingkat loka	25
Tabel 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (%)	26
Tabel 18. Perbandingan persentase RUP yang diumumkan dengan satker setingkat loka	27
Tabel 19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN LRMPHP (%)	28
Tabel 20. Perbandingan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dengan satker setingkat loka	29
Tabel 21. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	29
Tabel 22. Kegiatan kemitraan LRMPHP tahun 2025	30
Tabel 23. Data mitra LRMPHP tahun 2025	32
Tabel 24. Perbandingan kemitraan dengan satker setingkat loka	32
Tabel 25. Persentase dukungan manajemen teknis LRMPHP	33
Tabel 26. Perhitungan persentase dukungan manajemen teknis	33
Tabel 27. Perbandingan persentase dukungan manajemen dengan satker setingkat loka	33
Tabel 28. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal)	34
Tabel 29. Perbandingan inovasi pelayanan publik satker setingkat loka	36
Tabel 30. Realisasi anggaran LRMPHP TA 2025 per jenis belanja	36
Tabel 31. Pagu dan realisasi anggaran LRMPHP TA 2021-2025	36
Tabel 32. Realisasi anggaran TA 2025 sesuai Sasaran Kegiatan	37
Tabel 33. Efisiensi anggaran indikator kinerja LRMPHP tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi LRMPHP	4
Gambar 2. Dashboard Kinerjaku LRMPHP tahun 2025	15
Gambar 3. IKPA LRMPHP tahun 2025 berdasarkan MONEV PA	19
Gambar 4. Sosialisasi progress pencapaian target LRMPHP	21
Gambar 5. Nilai Kinerja Perencanaa Anggaran LRMPHP pada MONEV Kemenkeu	23
Gambar 6. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP tahun 2025	24
Gambar 7. Paket pengadaan LRMPHP tahun 2025.....	27
Gambar 8. Pelaksanaan kemitraan LRMPHP tahun 2025	31
Gambar 9. Penghargaan predikat informatif keterbukaan informasi publik LRMPHP	35
Gambar 10. Nilai efisiensi anggaran LRMPHP tahun 2025.....	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) sebagai instansi pemerintah dan penyelenggara negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dilanjutkan dengan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Pada perjanjian kinerja LRMPHP revisi per Desember 2025 target kinerja dituangkan dalam 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan dukungan anggaran sebesar Rp3.649.613.000,-. Pada akhir tahun 2025 seluruh IKK LRMPHP telah mencapai/ melampaui target dengan skor kinerja berdasarkan capaian volume/ output pada dashboard aplikasi Kinerjaaku Triwulan IV sebesar 110,72% (istimewa).



Pada tahun 2025 Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan rincian capaian 10 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Uraian IKK		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)	82	82	100,00	85	85	100,00
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	93,76	99,32	105,93	92	99,83	108,51
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	77,5	83,50	107,74	80	83,50	104,38
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71	100	120,00	71,5	100	120
5	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80	92,22	115,28	80,23	91,32	113,82
6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	-	-	-	80	100	120
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	-	-	-	80	97,50	120
8	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	2	2	100,00	3	4	120
9	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)	100	100	100,00	100	100	100,00
10	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	-	-	-	1	1	100,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil penilaian capaian kinerja LRMPHP tahun 2025 terdapat 5 IKK dengan kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 5 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target $<110\%$. Bila dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah IKK dengan nilai kinerja istimewa (warna biru) pada capaian kinerja tahun 2024, akan tetapi juga terdapat 2 IKK yang persentase capaian pada tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 hal ini terkait dengan adanya kebijakan peningkatan nilai target kinerja, yaitu pada:

1. IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP dari 82% menjadi 85%.
2. IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP dari 77,5 menjadi 80.
3. IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP dari 71 mejadi 71,5.
4. IKK Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP dari 80,00% mejadi 80,23%.

5. IKK Kemitraan yang disepakati dan/ atau ditindaklanjuti LRMPHP dari 2 kemitraan menjadi 3 kemitraan.

Disamping itu pada tahun 2025 terdapat 3 IKK baru, yaitu:

1. IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP dengan target 80%.
2. IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP dengan target 80%.
3. IKK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP dengan target 1 proposal.

Pada tahun 2025 Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dapat memenuhi serta melampaui target kinerja yang diharapkan. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun anggaran mendatang. Beberapa hal yang dapat diupayakan ke depan untuk meningkatkan nilai kinerja antara lain:

- Pengoptimalan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada komponen pengelolaan UP dan TUP dengan melaksanakan monitoring pengelolaan UP dan TUP supaya tidak terjadi keterlambatan.
- Pengoptimalan Indeks Profesionalitas ASN pada komponen kompetensi dengan memasukkan target Mengikuti diklat 20 JP pada SKP masing-masing pegawai dan pendampingan pegawai untuk memutakhirkan data secara mandiri pada sistem kepegawaian nasional (My ASN).
- Memanfaatkan kemitraan yang telah disepakati/ ditindaklanjuti sebagai *role model* untuk pelaksanaan transfer teknologi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) diwajibkan untuk: 1) Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; serta 2) Menyampaikan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

LRMPHP sebagai instansi pemerintah dan penyelenggara negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dilanjutkan dengan pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan dalam susunan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP. Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) tahun 2025 adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu:

- a. Menggambarkan capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan selama tahun 2025.
- b. Sebagai upaya mengetahui celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan dimasa mendatang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPP-MPHP) dibentuk atas inisiasi Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (PRPPSE), yang kini bernama Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP), pada Tahun 2003 untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada kegiatan mekanisasi proses pengolahan hasil perikanan termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun alat dan *scaling-up* proses dan peralatan pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, seiring perjalanan institusi BBRP2BKP yang mengalami beberapa kali perubahan organisasi/ nomenklatur serta beberapa kali mengalami pergantian sebagai institusi induk, dan menyebabkan kegiatan riset LPP-MPHP sempat mengalami kevakuman hingga tahun 2010. Selanjutnya pada Tahun 2011, penancangan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bercita-cita menaikkan tingkat produksi perikanan Indonesia, khususnya produksi budidaya, dijadikan momentum oleh BBRP2BKP untuk mengaktifkan kembali LPP-MPHP guna mendukung program tersebut.

Pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan Organisasi dan Tata Kelola dengan menggabungkan dua Badan yaitu Badan Litbang KP dan Badan Pengembangan SDM KP menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10/PERMEN-KP/2017 LPP-MHP diubah menjadi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP).

Pada Juni 2023 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencantumkan perubahan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BPPSDM KP

mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/PERMEN-KP/2020 adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan.

B. Tugas

LRMPHP mempunyai tugas melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

C. Fungsi

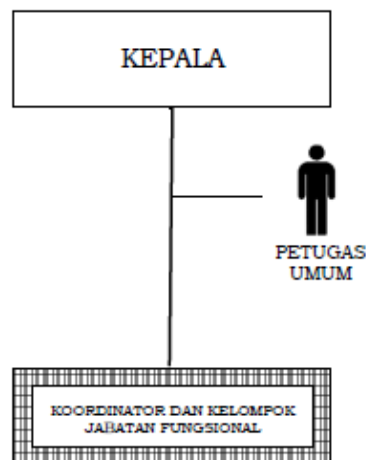
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LRMPHP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan penelitian mekanisasi pengolahan hasil perikanan dibidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada TA 2023 LRMPHP mengalami transisi tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan integrasi penelitian, pengembangan, dan uji terap (litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga LRMPHP tidak lagi menjalankan tugas riset. Kegiatan yang dijalankan oleh LRMPHP berupa kegiatan dukungan manajerial. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dibina secara teknis oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020, struktur organisasi LRMPHP seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Organisasi LRMPHP

Selain Petugas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, untuk mendukung tugas dan fungsi LRMPHP dalam bidang manajerial dan kegiatan operasional lainnya, dibutuhkan perangkat manajerial yang mendukung berjalannya kegiatan yaitu Penanggung Jawab Tata Usaha, Tata Operasional dan Pelayanan Teknis. Maka dilakukan pengembangan struktur organisasi LRMPHP menjadi bidang-bidang fungsi sebagai berikut:

- **Kelompok Jabatan Fungsional**
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok fungsional tersebut adalah jabatan fungsional instruktur, analis pengelolaan keuangan APBN, pranata keuangan APBN, analis SDM aparatur, perencana, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Tata Usaha**
Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, persuratan dan kearsipan serta pengelolaan prasarana dan sarana.
- **Tata Operasional**
Tata Operasional melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tata Operasional menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan LRMPHP.

- **Pelayanan Teknis**

Pelayanan Teknis memiliki tugas dalam pengelolaan data, informasi, komunikasi dan publikasi, serta pengembangan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Pelayanan Teknis melaksanakan kegiatan publikasi dengan ikut serta dalam pameran dan ekspose, serta melaksanakan pengelolaan sosial media dan website.

1.4. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, LRMPHP berperan menjadi pendorong penerapan teknologi yaitu melalui kegiatan bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kegiatan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana seperti laboratorium, workshop, dan bengkel konstruksi. Laboratorium yang ada di LRMPHP diantaranya yaitu Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Sensori, dan Laboratorium Kimia.

LRMPHP merupakan salah satu unit pelaksana teknis setingkat eselon IV di BPPSDM KP, keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. LRMPHP memiliki SDM sebanyak 33 orang terdiri dari 19 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 11 orang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dari 22 orang PNS tersebut 8 orang atau 36% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sisanya 13 orang atau 59% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 1 orang atau 5% merupakan pejabat struktural yaitu Kepala Loka.

Sumber daya sarana prasarana turut mendukung pelaksanaan kegiatan dukungan manajerial. Sumber daya sarana prasarana yang ada meliputi tanah dan bangunan, laboratorium, workshop, bengkel, *guest house*, peralatan penelitian, ruang perpustakaan, ruang pelayanan publik, ruang pertemuan dan ruang rapat, lapangan olahraga dan sarana fisik lainnya.

B. Permasalahan

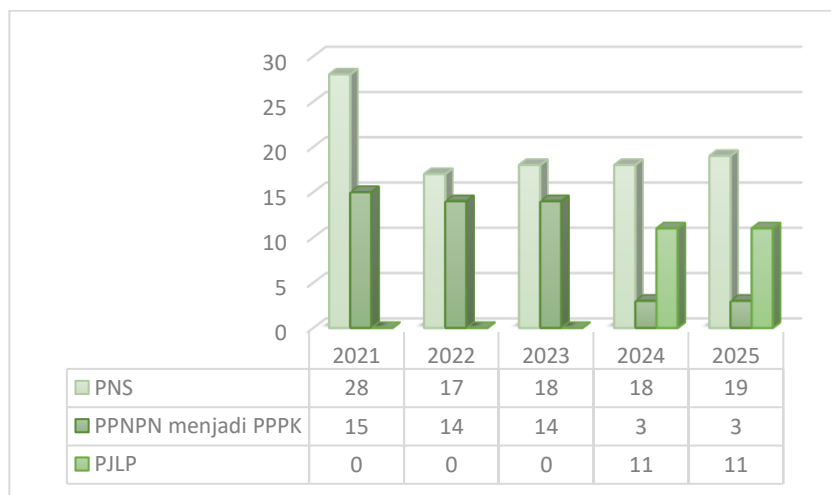
Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM nasional, regional, dan internasional;
- 2) Kurang optimalnya jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, untuk membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);

- 3) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai instrumen penjaminan mutu pengembangan SDM.

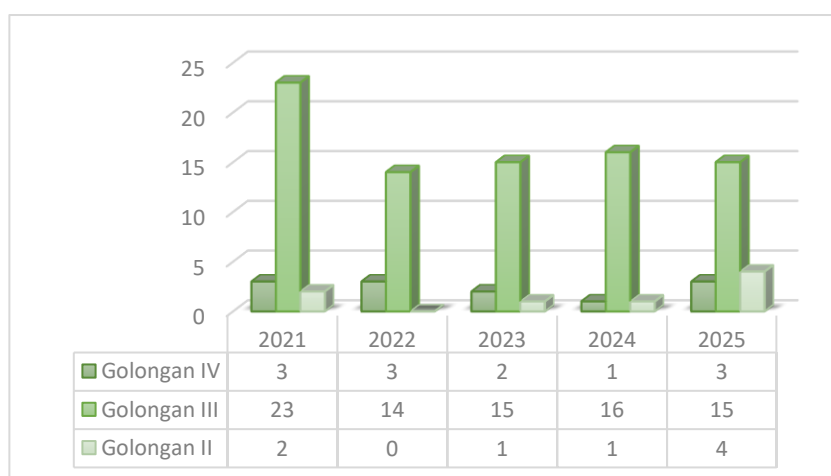
1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP

Pada akhir tahun 2025, LRMPHP didukung oleh 33 pegawai yang terdiri 3 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 11 orang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Grafik 1.



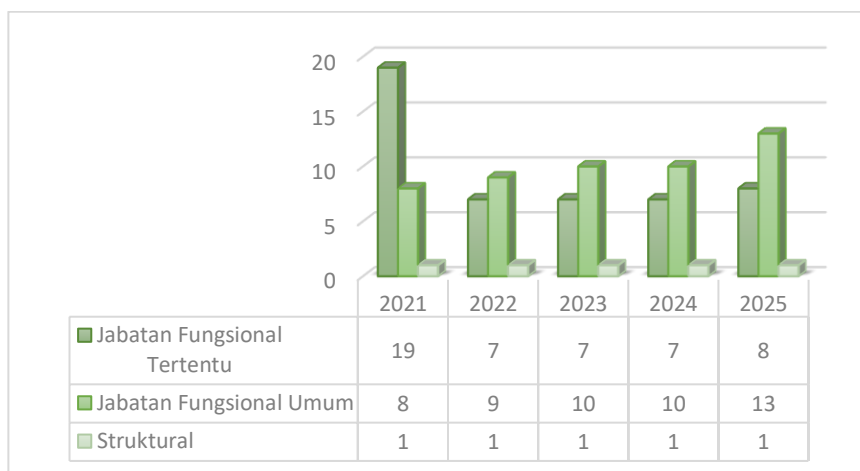
Grafik 1. Keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan Grafik 1. diketahui jumlah PNS LRMPHP pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 yaitu berjumlah 19 orang. Pada tahun 2025 terdapat 1 orang pegawai pensiun, dan menerima 2 pegawai mutasi dari Pusat Penyuluhan KP dan SUPM Ladong. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan pengalihan status 3 orang PPNPN menjadi PPPK. Selain berdasarkan status kepegawaian, keragaan pegawai LRMPHP juga ditampilkan berdasarkan golongan yang ditunjukkan pada Grafik 2.



Grafik 2. Keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan golongan

Berdasarkan Grafik 2., pegawai LRMPHP dikelompokkan menjadi golongan IV, III dan golongan II. Bertambahnya pegawai golongan IV terkait 1 orang naik pangkat dan penerimaan 1 orang pegawai mutasi, sedangkan penambahan jumlah pegawai golongan II terkait penerimaan 1 pegawai mutasi dan peralihan status pegawai dari PPNP menjadi PJLP golongan VII yang disetarakan dengan golongan II. Selanjutnya keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Grafik 3.



Grafik 3. Keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan jabatan

Berdasarkan Grafik 3., pada tahun 2025 terdapat peningkatan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu menjadi 8 orang pegawai yang terdiri dari fungsional instruktur madya sebanyak 1 orang, instruktur muda sebanyak 1 orang, instruktur pertama sebanyak 1 orang, analis pengelolaan keuangan APBN pertama 1 orang, pranata keuangan APBN mahir 1 orang, perencana pertama 1 orang, analis SDMA pertama 1 orang, dan pranata humas pertama 1 orang. Sedangkan pegawai LRMPHP sebagai pejabat struktural (Kepala LRMPHP) 1 orang, dan peningkatan jumlah pegawai fungsional umum menjadi 13 orang terkait dengan penerimaan mutasi pegawai dan pengalihan status PPNP menjadi PPPK. Sedangkan bila dikelompokkan berdasarkan gender, 22 orang pegawai LRMPHP terdiri dari 10 perempuan dan 12 laki-laki.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan pengantar laporan yang dilengkapi dengan tanggal, bulan, tahun serta ditandatangani oleh Kepala LRMPHP
- **Ringkasan eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja tahun 2025.

- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, potensi dan permasalahan, serta keragaan SDM LRMPHP.
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis LRMPHP, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja tahun 2025, serta pengukuran kinerja.
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2025.
- **Bab IV – Penutup**, menyajikan uraian singkat mengenai kesimpulan, permasalahan, dan rekomendasi.
- **Lampiran**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk kurun waktu jangka menengah yaitu lima tahunan. Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan LRMPHP mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara ringkas substansi Renstra Tahun 2025-2029 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

a. Visi

Visi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah mendukung visi BPPSDM KP dan KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

b. Misi

Misi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah menjalankan misi Presiden, KKP, dan BPPSDM KP yaitu melaksanakan 2 dari 8 misi/ Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem

pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital;

2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

c. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRMPHP, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan LRMPHP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang baik.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kinerja LRMPHP tahun 2025 menjalankan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan anggaran per bulan Desember 2025 sebesar Rp3.649.613.000,-. Pada tahun 2025 dilakukan revisi terhadap DIPA LRMPHP sebanyak 11 kali yang dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Revisi DIPA LRMPHP tahun 2025

Uraian	Tanggal DIPA	Total PAGU (Rp)	Kategori Revisi	Keterangan Revisi
DIPA Petikan Awal	2 Desember 2024	4.488.849.000		DIPA Pertama
DIPA Petikan Revisi 01	21 Februari 2025	4.488.849.000	Revisi DJA	Kebijakan blokir anggaran
DIPA Petikan Revisi 02	9 April 2025	4.488.849.000	Revisi DJA	Kebijakan buka blokir anggaran daya dan jasa
DIPA Petikan Revisi 03	23 April 2025	4.488.849.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran revisi POK dan penyesuaian halaman III DIPA
DIPA Petikan Revisi 04	14 Juli 2025	4.488.849.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran revisi POK dan penyesuaian hal III DIPA

Uraian	Tanggal DIPA	Total PAGU (Rp)	Kategori Revisi	Keterangan Revisi
DIPA Petikan Revisi 05	1 September 2025	3.579.625.000	Revisi Kanwil DJPb	Pengalihan blokir anggaran dan penyesuaian hal III DIPA
DIPA Petikan Revisi 06	14 Oktober 2025	3.579.625.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran revisi POK dan penyesuaian hal III DIPA
DIPA Petikan Revisi 07	13 November 2025	3.579.625.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran revisi POK pengalokasian gaji PPPK
DIPA Petikan Revisi 08	19 November 2025	3.649.613.000	Revisi Kanwil DJPb	Penambahan pagu belanja pegawai
DIPA Petikan Revisi 09	28 November 2025	3.649.613.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran Revisi KPA
DIPA Petikan Revisi 10	12 Desember 2025	3.649.613.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran Revisi KPA
DIPA Petikan Revisi 11	12 Desember 2025	3.649.613.000	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran Revisi KPA

Adapun Rencana Kerja LRMPHP tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja LRMPHP tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (Proposal)	1

2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Sekretaris BPPSDM KP. LRMPHP berada di bawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran LRMPHP per Januari TA 2025 sebesar Rp4.488.849.000,-. Hingga akhir Desember 2025 telah dilaksanakan satu kali revisi dokumen Perjanjian Kinerja dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penjelasan revisi Perjanjian Kinerja LRMPHP tahun 2025

No	Perubahan	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1	Pihak Kedua Pejabat Penandatangan Perjanjian Kinerja	Sekretaris BPPSDM KP Rudi Alek Wahyudin	Plt. Sekretaris BPPSDM KP Joni Haryadi D
2	Pagu Anggaran	Rp4.488.849.000,-	Rp3.649.613.000,-
3	Tanggal Perjanjian Kinerja	30 Januari 2025	5 Desember 2025

Pada 5 Desember 2025 dilakukan revisi perjanjian kinerja terkait telah terbitnya DIPA revisi pengalihan blokir anggaran dan penambahan belanja pegawai untuk pemenuhan gaji PPPK. Sasaran Kegiatan LRMPHP didukung oleh pagu anggaran tahun 2025 per Desember sebesar Rp3.649.613.000,-. Perjanjian Kinerja LRMPHP per desember tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja LRMPHP tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (Proposal)	1

2.4. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Dalam melakukan pengukuran kinerja harus memperhitungkan polarisasi IKK diantaranya: *maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *stabilize* yaitu semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Adapun ketentuan penetapan indeks capaian IKK nilai minimal adalah 0 dan maksimum adalah 120, terdapat perbedaan formula penghitungan indeks untuk setiap jenis polarisasi, adapun status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:

Skor	Status Warna
Nilai 110-120	Istimewa
Nilai 90 - < 110	Baik
Nilai 70 - < 90	Cukup
Nilai 50 - < 70	Kurang
Nilai < 50	Sangat kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada tiap-tiap indikator kinerja.

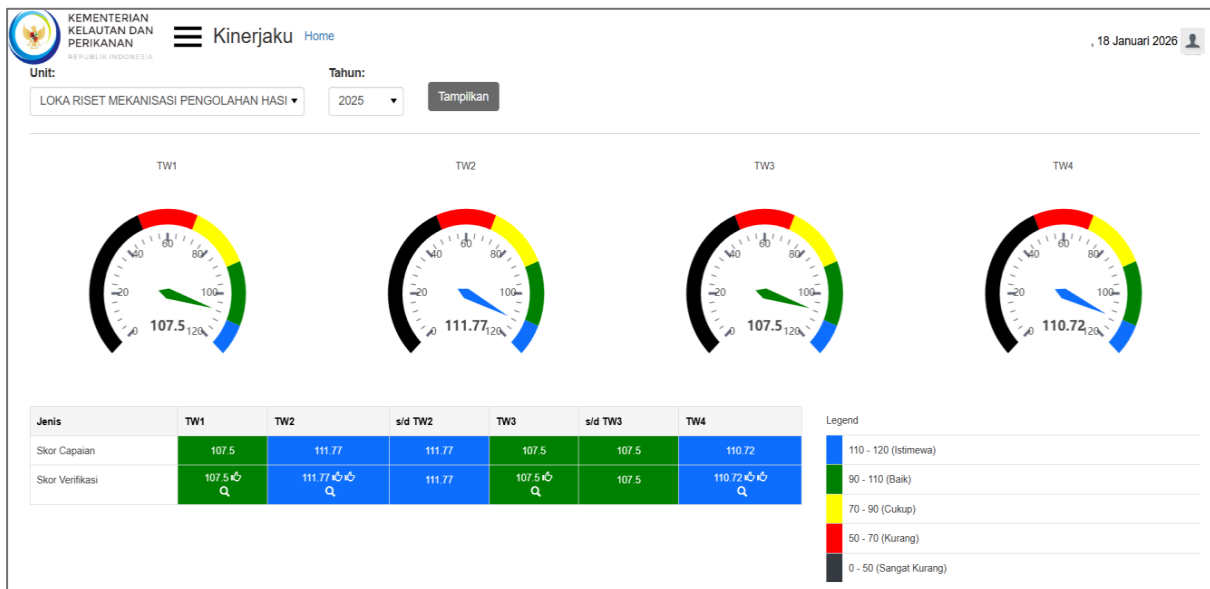
b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRMPHP dilakukan secara berkala setiap tiga bulan (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja lingkup LRMPHP tahun 2025 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Loka Riset Mekainsasi Pengolahan Hasil Perikanan No 13/KPA/LRMPHP/OT.210/II/2025. Keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung Jawab Manajerial di lingkup LRMPHP, dan pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRMPHP. Berdasarkan laporan penanggungjawab kegiatan, kepala LRMPHP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP pada akhir tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja yaitu pada laman www.kinerjaku.kkp.go.id Triwulan IV tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja LRMPHP pada Triwulan IV LRMPHP diperoleh skor kinerja 110,72% (istimewa). Terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LRMPHP dengan capaian kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target Triwulan IV $\geq 110\%$ dan 5 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target Triwulan IV $<110\%$. Dashboard Kinerjaku LRMPHP tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku LRMPHP tahun 2025

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar Sasaran Kegiatan tahun 2025 dapat tercapai. Capaian kinerja LRMPHP tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks capaian IKK LRMPHP tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Realisasi 2025	%
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85	85	100,00
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92	99,83	108,51
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80	83,50	104,38
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5	100	120,00
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23	91,32	113,82
	6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80	100	120,00
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80	97,50	120,00
	8	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3	4	120,00
	9	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100	100	100,00
	10	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1	1	100,00

Secara detail capaian SK dan IKK LRMPHP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.2.1. SK 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 10 IKK sebagai berikut:

a. IKK 1: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Triwulan IV tahun 2024 s.d. tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRMPHP. IKK ini

menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/ melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP

IKK 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	80	82	85	85	100	3,66	89	95,51

Capaian IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP berdasarkan surat Sekretaris BPPSDM KP Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan realisasi dan target 85%. Capaian sebesar 100% ini diperoleh karena pada LRMPHP tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP merupakan IKK baru pada TA 2023. Realisasi IKK pada Tahun 2025 mengalami kenaikan 3,66% dari capaian tahun 2024. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra 2029 telah tercapai 95,51%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain penyelesaian temuan hasil pengawasan (jika ada) dan update tindak lanjut temuan pada aplikasi SIDAK. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK tersebut yaitu kegiatan pelayanan tata usaha antara lain: a) Mengikuti rekonsiliasi Laporan Keuangan semesteran; b) Penyampaian LPJ bendahara secara tertib; c) Menerapkan SPIP dan MR; serta d) Memasukkan indikator pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (jika ada) pada target indikator kinerja individu SKP pegawai yang terkait. Target IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP tahun 2025 sebesar 85% lebih tinggi dari target pada tahun 2024 yang sebesar 82%.

Berdasarkan surat Sekretaris BPPSDM KP Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” diketahui capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu sebesar 93,24% penyelesaian rekomendasi. Adapun perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 7. Diketahui bahwa target dan

realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP sama dengan LRPT, LRBRL, LPTK, dan LRSDKP.

Tabel 7. Perbandingan persentase rekomendasi hasil pengawasan dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	85	85	100
2	LRPT	85	85	100
3	LRBRL	85	85	100
4	LPTK	85	85	100
5	LRSDKP	85	85	100

b. IKK 2: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Masing-masing indikator tersebut memiliki pembobotan yang berbeda. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

IKK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
97,42	97,62	94,40	99,32	92	99,83	108,51	0,51	92,2	108,28

Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP pada tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 sebesar 108,51% dengan realisasi 99,83 dari target 92,00. Capaian tahun 2025 mengalami kenaikan 0,51% dari tahun 2024 dan merupakan capaian tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan target Renstra LRMPHP tahun 2029 telah tercapai 108,28%. Nilai IKPA LRMPHP tahun 2025 berdasarkan data MONEV PA OM SPAN dapat dilihat pada Gambar 3.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.67	100.00	79.87	80%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.33				100.00				

Sumber: menu MONEV PA pada OM SPAN, 8 Januari 2026

Gambar 3. IKPA LRMPHP tahun 2025 berdasarkan MONEV PA

Faktor keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain: 1) Kesesuaian realisasi belanja dengan rencana penarikan dana (Hal III DIPA); 2) Pencapaian target realisasi anggaran; dan 3) Ketepatan dan kesesuaian pengisian capaian output. Dari ketujuh komponen pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat satu komponen yang belum optimal yaitu pada pengelolaan UP dan TUP. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan hal tersebut diantaranya: meningkatkan pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap perputaran (revolving) Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran dan memastikan pertanggungjawaban penyelesaian TUP diselesaikan tepat waktu.

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian IKK nilai IKPA LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu: revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana. Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP pada tahun 2025 sebesar 92 lebih rendah dari target tahun 2024 sebesar 93,76.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 diketahui nilai IKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu sebesar 90,31% sehingga IKPA LRMPHP telah melampaui IKPA KKP. Dengan capaian IKPA sebesar 99,83 LRMPHP menempati urutan 8 dari total 174 satuan kerja. Adapun perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 9. Diketahui bahwa capaian nilai IKPA LRMPHP paling tinggi dibandingkan IKPA LRPT, LRBRL, LPTK, dan LRSDKP.

Tabel 9. Perbandingan IKPA dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	92	99,83	108,51
2	LRPT	92	92,20	100,22
3	LRBRL	92	98,93	107,53
4	LPTK	92	96,49	104,88
5	LRSDKP	92	95,85	104,18

c. IKK 3: Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)

Penilaian Mandiri (PM) SAKIP LRMPHP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP LRMPHP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/ melebihi target yang ditetapkan.

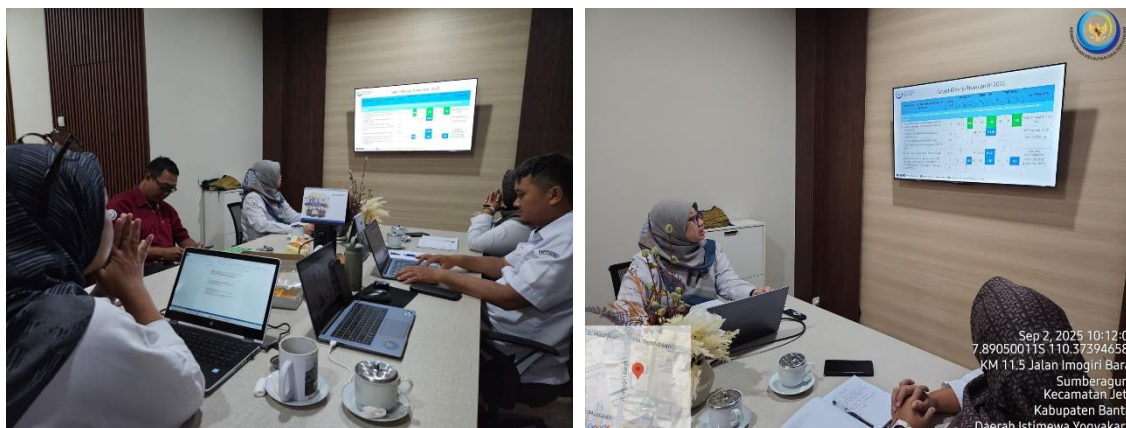
Tabel 10. Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)

IKK 3. Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	82	83,50	80	83,50	104,38	0	80	104,38

Capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP pada tahun 2025 berdasarkan surat Sekretaris BPPSDM KP nomor B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 BPPSDM sebesar 104,38% dengan realisasi 83,50 dari target 80,00. Capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP ini sama dengan realisasi tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target Renstra LRMPHP tahun 2029 telah tercapai 104,38%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian nilai SAKIP LRMPHP yaitu: 1) Telah tersedianya dokumen SAKIP LRMPHP selama 5 tahun terakhir (2021-2025); 2) Kesesuaian perencanaan kinerja; 3) Ketertiban pengukuran dan pelaporan kinerja; serta 4) Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu: 1) Penyusunan dokumen SAKIP LRMPHP tahun 2025; 2) Mengikuti pendampingan pengisian LKE PM SAKIP oleh tim Sekretariat BPPSDM KP; dan 3) Dilakukan sosialisai kepada pegawai terkait progres pencapaian target kinerja LRMPHP melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi yang dapat dilihat pada Gambar 4. Target IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP pada tahun 2025 sebesar 80 lebih tinggi dari tahun 2024 yaitu 77,5.



Gambar 4. Sosialisasi progress pencapaian target LRMPHP

Hasil Penilaian Mandiri SAKIP diperoleh dari kegiatan Penilaian Mandiri SAKIP yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat BPPSDM KP pada tahun 2025. Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 diperoleh nilai SAKIP LRMPHP sebesar 83,50 yang rincian nilainya dapat dilihat pada Tabel 11. Dari 4 komponen penyusun nilai SAKIP, diperoleh capaian nilai terendah pada komponen evaluasi kinerja. Pada evaluasi kinerja LRMPHP telah dapat memenuhi keseluruhan dokumen evaluasi kinerja, akan tetapi belum terdapat upaya inovatif yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. Kedepan jika dimungkinkan dapat diterapkan inovasi terkait evaluasi kinerja.

Tabel 11. Hasil penilaian mandiri SAKIP LRMPHP tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Kinerja	25	20,50
Total Nilai		100	83,50
Predikat			A

Adapun perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 12. Pada tahun 2025, LRMPHP menetapkan target PM SAKIP sebesar 80 dan berhasil merealisasikan nilai sebesar 83,50. Secara nominal, nilai realisasi 83,50 ini merupakan angka capaian tertinggi yang diraih secara bersama oleh empat dari lima loka yang diperbandingkan, yaitu LRMPHP, LRPT, LRBRL, dan LRSDKP sedangkan LPTK memiliki nilai paling rendah. Keberhasilan LRMPHP menempati peringkat teratas dalam persentase capaian PM SAKIP (104,38%) di antara satker setingkat loka menegaskan kuatnya komitmen institusi terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Fakta bahwa LRMPHP mampu mengungguli sebagian besar

loka lainnya membuktikan bahwa implementasi sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja internal di LRMPHP telah berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 12. Perbandingan PM SAKIP dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	80	83,50	104,38
2	LRPT	80,50	83,50	103,73
3	LRBRL	80	83,50	104,38
4	LPTK	80	81,20	101,50
5	LRSDKP	81	83,50	103,09

d. IKK 4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kemeterian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Tabel 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

IKK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
86,13	85,58	86,37	100	71,50	100	120	0	72,50	120,00

Capaian IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP pada tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 sebesar sebesar 120% dengan realisasi 100 dari target 71,50. Tidak terdapat peningkatan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP jika dibandingkan NKPA tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target Renstra LRMPHP tahun 2029 telah tercapai 120,00%. Target IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun 2025 sebesar 71,50 target ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yaitu 71.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP yaitu: 1) Pengisian laporan capaian output bulanan secara tepat waktu; 2) Kegiatan pelaksanaan anggaran; 3) Implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRMPHP yaitu: 1) Mengisi realisasi capaian output bulanan pada SAKTI, dan menjaga indeks realisasi anggaran agar selaras dengan indeks SBKU. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP tahun 2025 pada aplikasi MONEV Kemenkeu dapat dilihat pada Gambar 5.

LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Role

Pilih TA (2025)

Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satke

Download Excel

Tampilkan10entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	033.11.403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Monev Kemenkeu, 8 Januari 2026

Gambar 5. Nilai Kinerja Perencanaa Anggaran LRMPHP pada MONEV Kemenkeu

Adapun perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 14. Diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP sama dengan capaian LRPT, LRBRL, LPTK, dan LRSDKP.

Tabel 14. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaa Anggaran dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	71,50	100	120
2	LRPT	71,50	100	120
3	LRBRL	71,50	100	120
4	LPTK	71,50	100	120
5	LRSDKP	71,50	100	120

e. IKK 5: Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pengawai Negeri Sipil dan Pengawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Indeks profesionalitas

ASN diperoleh dari empat komponen yaitu 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja dan 4) Disiplin. Nilai IP ASN dapat diperoleh melalui laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>.

Tabel 15. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)

IKK 5. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
86,61	85,88	91,78	92,22	80,23	91,32	113,82	-0,98	80,60	113,30

Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP pada tahun 2025 berdasarkan Surat BPPSDM KP NOMOR 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Capaian IP ASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM KP sebesar 113,82% dengan realisasi 91,32 dari target 80,23. Capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) LRMPHP ini lebih rendah jika dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 0,98%. Penurunan ini terjadi karena adanya penerimaan mutasi pegawai masuk ke LRMPHP sehingga menurunkan keseluruhan nilai IP ASN LRMPHP. Apabila dibandingkan dengan target Renstra LRMPHP tahun 2025 telah tercapai 113,82%.

Pada akhir tahun 2025 LRMPHP memiliki 19 PNS yang dihitung indeks profesionalitasnya, diperoleh IP ASN 91,32 (sangat tinggi) yang terdiri dari : komponen kualifikasi dengan indeks 24,21; kompetensi dengan indeks 36,05; kinerja dengan indeks 26,05; dan disiplin dengan indeks 5. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP pada tahun 2025 pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025> dapat dilihat pada Gambar 6.

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Mekanisasi		Cari										
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	19	24.21	96.84 %	36.05	90.12 %	26.05	86.83 %	5	100 %	91.32	SANGAT TINGGI

Gambar 6. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP tahun 2025

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain: 1) Pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan; 2) Mengikuti diklat kepemimpinan/ diklat fungsional/ diklat teknis/ diklat 20 JP; 3) Pemenuhan target SKP, dan 4) Menjaga kedisiplinan pegawai. Kegiatan yang menunjang capaian IKK indeks profesionalitas ASN LRMPHP yaitu kegiatan

kapabilitas pegawai dan implementasi SKP. Target IKK Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP tahun 2025 sebesar 80,23 target ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yaitu 80.

Berdasarkan data pada website Biro Kepegawaian diketahui bahwa capaian IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 86,03. Indeks profesionalitas ASN LRMPHP tahun 2025 lebih tinggi dari nilai IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 16. Diketahui bahwa capaian IP ASN LRMPHP lebih rendah dibandingkan LRSDKP, tetapi lebih tinggi dibandingkan capaian LRPT, LRBRL, dan LPTK.

Tabel 16. Perbandingan IP ASN dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	80,23	91,32	113,82
2	LRPT	85	88,40	104,00
3	LRBRL	81,50	85,81	105,29
4	LPTK	83	90,36	108,87
5	LRSDKP	82	95,00	115,85

f. IKK 6: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)

IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP merupakan IKK baru pada tahun 2025. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (satuan kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

IKK ini merupakan persentase nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP dibandingkan dengan pagu pengadaan barang/jasa. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (%)

IKK 6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP LRMPHP (%)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	-	-	80	100	120	-	84	119,05

Capaian IKK persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP berdasarkan Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar 120% dengan realisasi 100% dari target 80%. IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 119,05%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini yaitu penyesuaian form kertas kerja rencana pengadaan TA 2025 pasca efisiensi anggaran dan revisi anggaran. Kertas kerja ini digunakan sebagai dasar untuk revisi paket-paket pengadaan yang terdapat di SiRUP untuk selanjutnya diumumkan ulang. Perbedaan antara SiRUP terumumkan dengan kertas kerja akan mempengaruhi nilai IKK ini.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk menjaga konsistensi keberhasilan pencapaian kinerja antara lain: 1) Percepatan pengumuman RUP di awal tahun sehingga mendukung percepatan eksekusi tender/pengadaan sejak Triwulan I, sehingga penyerapan anggaran riset dan belanja operasional dapat berjalan lebih progresif), 2) Mitigasi dampak revisi anggaran yang mempengaruhi perubahan paket pengadaan dan melakukan penyesuaian form kertas kerja rencana pengadaan TA 2025 pasca efisiensi anggaran dan revisi anggaran; 3) Sinergitas tim perencana, keuangan, dan pengadaan untuk mencegah adanya paket belanja/pengadaan yang terlewat dari identifikasi SiRUP; serta 4) Peningkatan kapasitas pengelola PBJ.

Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu sinkronisasi data SiRUP dengan dokumen hasil revisi anggaran. Sinkronisasi data dilaksanakan setelah ada DIPA revisi anggaran terbit. Paket pengadaan LRMPHP TA 2025 yang telah diumumkan pada SiRUP dapat dilihat pada Gambar 7. Secara keseluruhan terdapat 17 paket yang terdiri dari paket penyedia 4 dan paket swakelola 13.

No	Satuan Kerja	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	4	442	13	483	0	0	17	925

Sumber: laman <https://sirup.inaproc.id/> tahun 2025, Desember 2025

Gambar 7. Paket pengadaan LRMPHP tahun 2025

Berdasarkan Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 diketahui bahwa capaian persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 99,02. Capaian IKK persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP tahun 2025 lebih tinggi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 18. Diketahui bahwa capaian LRMPHP sama dengan LRPT, LRBRL, LPTK, dan LRSDKP.

Tabel 18. Perbandingan persentase RUP yang diumumkan dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	80	100	120
2	LRPT	80	100	120
3	LRBRL	80	100	120
4	LPTK	80	100	120
5	LRSDKP	80	100	120

g. IKK 7: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)

IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%) didefinisikan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN tahun 2025 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/penyampaian usulan RKBMN tahun 2027 (5%).

IKK tingkat kepatuhan pengelolaan BMN LRMPHP merupakan IKK baru pada TA 2025. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN LRMPHP (%)

IKK 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	-	-	80	97,50	120	-	84	116,07

Capaian IKK tingkat kepatuhan pengelolaan BMN LRMPHP berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM KP Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tentang Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025” yaitu sebesar 120% dengan realisasi 97,50 dari target 80,00. IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 116,07%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain: 1) Tersedianya RKBM tahun 2025; 2) Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2025; 3) Pengusulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 4) Pengusulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025; 5) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 6) Penyusunan laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu; serta 7) Penyusunan/penyampaian usulan RKBMN tahun 2027. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKK ini antara lain melaksanakan rekonsiliasi internal data BMN secara tertib.

Perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 20. Diketahui bahwa capaian LRMPHP lebih tinggi dari capaian LRPT dan LRSDKP, sama dengan LRBRL, tetapi lebih rendah dari LPTK.

Tabel 20. Perbandingan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	80	97,50	120
2	LRPT	80	85	106,25
3	LRBRL	80	97,50	120
4	LPTK	80	100	120
5	LRSDKP	80	90	112,50

h. IKK 8: Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)

IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP didefinisikan sebagai suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara LRMPHP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan aset LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 21. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)

IKK 8. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
1	1	2	2	3	4	120	100	3	120

Capaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP tahun 2025 sebesar 120% dengan target 3 kemitraan dan realisasi sejumlah 4 kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan oleh LRMPHP pada tahun 2025 merupakan kemitraan dengan jumlah terbanyak pada 5 tahun terakhir. Terdapat 3 kemitraan dengan pihak SMK terkait magang dan pengembangan kurikulum SMK berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri serta 1 kemitraan dengan BAPAS II Wonosari terkait pelaksanaan diseminasi teknologi mekanisasi kelautan perikanan dan bimbingan kemandirian bagi klien masyarakat. Capaian kemitraan pada tahun 2025 meningkat 100% dari tahun 2024. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 120%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain pelaksanaan kegiatan kemitraan yang telah disepakati dan menginisiasi penjalinan kerjasama kegiatan pengembangan SDM. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP tahun 2025 yaitu: 1) Penjalinan kerjasama kegiatan pengembangan SDM melalui program pengembangan kurikulum akademik dan

pemagangan dengan SMK N 1 Jepara, SMK N 1 Sanden dan SMK N 1 Tanjungsari; 2) Kemitraan dengan BAPAS Kelas II Wonosari melalui kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan untuk bekal warga binaan yang baru saja bergabung dengan masyarakat; dan 3) Telah dilaksanakan monev kegiatan kerjasama LRMPHP. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemitraan pada tahun mendatang yaitu melakukan identifikasi potensi kerja sama dengan mitra eksternal untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi serta mendukung program prioritas BPPSDM KP. Adapun detail dari perjanjian kerjasama dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Kegiatan kemitraan LRMPHP tahun 2025

Pihak Terkait	Kerjasama	Jangka Waktu	Tujuan
BAPAS Kelas II Wonosari	Pelaksanaan Diseminasi Teknologi Mekanisasi Kelautan Perikanan dan Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Pemasyarakatan Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Wonosari	27 Maret 2025 - 27 Maret 2027	Diseminasi teknologi mekanisasi kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan wilayah kerja BAPAS Kelas II Wonosari sehingga diharapkan dapat kembali produktif, berfungsi sosial di masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana
SMK N 1 Jepara	Kemitraan dalam Rangka Magang dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri	5 Mei 2025 - 5 Mei 2027	Pelaksanaan magang dan pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri
SMK N 1 Sanden	Pelaksanaan Magang dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri	20 September 2024 - 20 September 2026	Pelaksanaan magang dan pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri
SMK N 1 Tanjungsari	Kemitraan dalam Rangka Pelatihan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri	31 Juli 2023 – 31 Juli 2026	Melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri

Pelaksanaan kegiatan kemitraan LRMPHP tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 8., dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- SMK N 1 Jepara

SMK N 1 Jepara mengirimkan enam siswi untuk melaksanakan kegiatan magang di LRMPHP selama empat bulan, terhitung dari tanggal 24 Juni hingga 23 Oktober 2025. Selama periode PKL tersebut, para siswa memperoleh berbagai manfaat sesuai dengan poin-poin

yang tercantum dalam perjanjian kerja sama, yaitu pembuatan produk olahan antara lain: lele asap, tahu bakso ikan, moci, brownies, dan bakpia rumput laut.

- SMK N 1 Sanden

SMK N 1 Sanden mengirimkan dua siswi untuk melaksanakan kegiatan magang di LRMPHP selama lima bulan, terhitung dari tanggal 1 Juli hingga 30 November 2025. Selama periode PKL tersebut, para siswa memperoleh berbagai manfaat sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam perjanjian kerja sama, yaitu pembuatan produk olahan antara lain: lele asap, tahu bakso ikan, moci, brownies, bakpia, donat rumput laut, basreng lele, serta abon tuna tewel.

- SMK N 1 Tanjungsari

Pada tahun 2025 SMK N 1 Tanjungsari tidak mengirimkan siswanya untuk magang di LRMPHP karena kekosongan siswa pada jurusan terkait. Sehingga sebagai wujud kegiatan kerjasama antara LRMPHP dengan SMK N 1 Tanjungsari dilakukan kegiatan sinkronisasi kurikulum dunia pendidikan dengan dunia industri.

- BAPAS Kelas II Wonosari

Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis kemandirian bagi klien BAPAS Kelas II Wonosari. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Oktober 2025 yang bertepatan dengan momen bulan bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan bertempat di Aula LRMPHP. Sebanyak 12 orang klien masyarakat dari wilayah kerja Bapas Kelas II Wonosari turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tema kegiatan bimbingan teknis kemandirian adalah “Pembuatan Lele Asap dan Pengenalan Alpindel untuk Pembuatan Tahu Bakso Ikan” yang dipandu oleh instruktur LRMPHP.



Gambar 8. Pelaksanaan kemitraan LRMPHP tahun 2025

Selain melaksanakan 4 kegiatan kemitraan, pada tahun 2025 LRMPHP juga menerima kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sejumlah 28 taruna Prodi Mekanisasi Poltek KP Sidoarjo periode Januari-Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk pemanfaatan bersama aset LRMPHP. Dilaksanakan kegiatan perkuliahan, pembuatan miniprojek yang dibimbing oleh instruktur LRMPHP, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan. Data peserta magang, bimbingan teknis, dan MBKM disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Data mitra LRMPHP tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	
		Perempuan	Laki - Laki
1	Magang SMK N 1 Jepara	6	
2	Magang SMK N 1 Sanden	2	
3	Bimbingan teknis BAPAS kelas II Wonosari	1	11
4	MBKM Poltek KP Sidoarjo		28

Perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 24. Diketahui bahwa capaian LRMPHP lebih tinggi dari capaian LRBRL, sedangkan LRPT, LRSDKP dan LPTK tidak memiliki target kemitraan.

Tabel 24. Perbandingan kemitraan dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	3	4	120
2	LRPT	-	-	-
3	LRBRL	2	3	120
4	LPTK	-	-	-
5	LRSDKP	-	-	-

i. IKK 9: Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)

Dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian atas IKK ini adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Persentase dukungan manajemen teknis LRMPHP

IKK 9. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	100	100	100	100	100	100	0	100	100

Pada Tahun 2025, capaian output/volume IKK persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP sebesar 100% dengan realisasi dan target 100% yaitu dengan telah disusunnya laporan kegiatan manajerial bulan Januari hingga Desember tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan Tata Operasional, Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan dirangkum menjadi kegiatan LRMPHP. Tidak terdapat kenaikan capaian kinerja bila dibandingkan capaian pada tahun 2024. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 100%. Target persentase layanan dukungan manajemen internal LRMPHP pada tahun 2025 sebesar 100, sama dengan target tahun 2024.

Tabel 26. Perhitungan persentase dukungan manajemen teknis

Dokumen	Target	Capaian	%
Laporan Tata Usaha	12	12	100%
Laporan Tata Operasional	12	12	100%
Laporan Pelayanan Teknis	12	12	100%
Laporan Kegiatan LRMPHP	12	12	100%
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal	48	48	100%

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP tahun 2025 yaitu ketertiban dan kesesuaian penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan manajerial. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKI yaitu seluruh kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan di LRMPHP baik di Tata Usaha, Tata Operasional, dan Pelayanan Teknis.

Perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 27. Diketahui bahwa capaian LRMPHP sama dengan capaian LRBRL, LRSDKP dan LPTK sedangkan LRPT tidak memiliki target IKI persentase dukungan manajemen.

Tabel 27. Perbandingan persentase dukungan manajemen dengan satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	100	100	100
2	LRPT	-	-	-
3	LRBRL	100	100	100

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
4	LPTK	100	100	100
5	LRSDKP	100	100	100

j. IKK 10: Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 28. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal)

IKK 10. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal)									
Realisasi				2025			% Kenaikan 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	-	-	1	1	100	-	1	100

IKK inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP merupakan IKK baru pada tahun 2025. Pengukuran IKK inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP yaitu dengan perhitungan jumlah proposal yang disampaikan dan ditetapkan ke dalam Keputusan Kepala BPPSDM. Capaian IKK inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP adalah 100% dengan target dan realisasi 1 proposal. Capaian ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 100%.

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP bernama APeLL (Aplikasi Pelayanan LRMPHP). APeLL merupakan sebuah platform berbasis website yang dirancang untuk memfasilitasi proses permohonan layanan seperti magang, pelatihan, dan kunjungan ilmiah secara lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi. Inovasi ini menjawab tantangan dalam sistem permohonan layanan yang sebelumnya masih bersifat konvensional,

seperti pengiriman surat elektronik, kontak personal, atau kunjungan langsung ke kantor yang menghabiskan waktu dan tidak efisien dalam pencatatan data. Tujuan utama APeLL adalah memberikan akses yang mudah dan responsif kepada masyarakat untuk mengakses layanan secara daring, sekaligus membantu penyelenggara layanan dalam mendokumentasikan data pengguna dan memonitor aktivitas layanan secara sistematis. Keunggulan APeLL terletak pada kemampuannya mendigitalisasi seluruh alur pelayanan sekaligus menjadi alat monitoring kegiatan peserta oleh pembimbing secara real-time, sehingga mendukung penyelenggaraan layanan riset dan pelatihan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.

Faktor pendukung keberhasilan Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP tahun 2025 yaitu adanya tim pengelola pelayanan publik LRMPHP yang berinovasi dalam mempermudah dan mempercepat proses permohonan pelayanan bagi pengguna layanan. Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di LRMPHP berupa magang siswa, serta melakukan inovasi layanan dengan memanfaatkan teknologi inovasi menggunakan platform digital berbasis website yang disebut dengan APeLL. Pada tahun mendatang belum dapat dilaksanakan pengembangan aplikasi APeLL lebih lanjut, dikarenakan LRMPHP akan mengalami perubahan tugas dan fungsi yang akan mempengaruhi jenis layanan yang dilaksanakan oleh LRMPHP. Disamping itu pada tahun 2025 tim Pelayanan Teknis LRMPHP mengikuti monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan berhasil meraih predikat informatif yang sertifikatnya ditampilkan pada Gambar 9. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen serta kerja bersama seluruh pegawai LRMPHP dalam menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.



Gambar 9. Penghargaan predikat informatif keterbukaan informasi publik LRMPHP

Perbandingan target dan realisasi IKK dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDM KP dapat dilihat pada Tabel 29. Diketahui bahwa capaian LRMPHP

sama dengan capaian LPTK, sedangkan LRPT, LRSDKP dan LRBRL tidak memiliki target inovasi pelayanan publik.

Tabel 29. Perbandingan inovasi pelayanan publik satker setingkat loka

No	Satuan Kerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	LRMPHP	1	1	100
2	LRPT	-	-	-
3	LRBRL	-	-	-
4	LPTK	1	1	100
5	LRSDKP	-	-	-

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada akhir tahun 2025 pencapaian realisasi anggaran LRMPHP sebesar 98,98% atau Rp3.612.489.800,- dari total pagu Rp3.649.613.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar 98,98% pada akhir tahun dapat diperoleh capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk 5 IKK dengan kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi $\geq 110\%$ dan 5 IKK dengan kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi dapat memenuhi/ melampaui target yang telah ditetapkan. Skor kinerja berdasarkan capaian volume pada aplikasi KinerjaKube sebesar 110,72% (dapat melampaui target).

Data rincian realisasi anggaran satker LRMPHP pada tahun 2025 per jenis belanja dapat dilihat pada belanja pegawai lebih rendah dari belanja barang. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan perpajakan gaji pegawai sehingga anggaran yang telah dipersiapkan untuk lonjakan pajak akhir tahun tidak terealisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum, capaian kinerja LRMPHP pada tahun 2025 telah memperlihatkan hasil yang baik. Namun demikian tetap perlu dilakukan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan LRMPHP kedepan untuk dapat meningkatkan realisasi anggaran.

Tabel 30. Realisasi anggaran LRMPHP TA 2025 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.658.837.000	2.623.049.598	98,65
Belanja Barang	990.776.000	989.440.202	99,87
Total	3.649.613.000	3.612.489.800	98,98

Sumber data: OM SPAN (31 Desember 2025)

Sedangkan pagu dan realisasi anggaran satker LRMPHP tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Pagu dan realisasi anggaran LRMPHP TA 2021-2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2021	6.033.327.000	5.971.468.515	98,87
2022	4.586.389.000	4.543.574.270	99,07

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2023	4.477.483.000	4.411.954.380	98,54
2024	4.436.931.000	4.297.063.965	96,85
2025	3.649.613.000	3.612.489.800	98,98

Sumber data: OM SPAN (31 Desember 2025)

Berdasarkan data pagu dan realisasi capaian anggaran LRMPHP TA 2021-2025 yang disajikan pada Tabel 31, diketahui bahwa pada TA 2025 terdapat penurunan pagu anggaran dibandingkan TA 2021-2024 hal ini erat kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran. Sedangkan persentase realisasi anggaran LRMPHP tahun 2025 lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Selain data realisasi anggaran per jenis belanja, data realisasi juga ditampilkan per Sasaran Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Realisasi anggaran TA 2025 sesuai Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					3.649.613.000	3.612.489.800	98,98
1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85	85	100,00	Layanan Umum	5.454.000	5.449.000	99,91
2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92	99,83	108,51	Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Manajemen Keuangan	300.000	300.000	100,00
3 Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80	83,50	104,38	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	200.000	199.650	99,83
4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5	100	120,00	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100.000	100.000	100,00
5 Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23	91,32	113,82	Layanan Manajemen SDM	200.000	200.000	100,00
6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80	100	120,00	Layanan Umum	5.454.000	5.449.000	99,91

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Realisasi 2025	%	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80	97,50	120,00	Layanan Umum	5.454.000	5.449.000	99,91
8	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3	4	120,00	Layanan Hubungan Masyarakat	103.000	98.795	95,92
9	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100	100	100,00	Layanan Perkantoran	3.632.246.000	3.595.145.560	98,98
10	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1	1	100,00	Layanan Hubungan Masyarakat	102.000	98.795	96,86

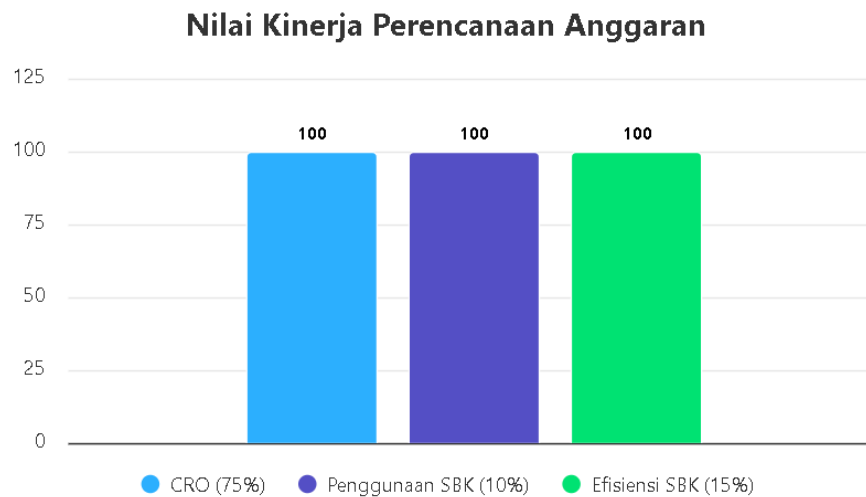
3.4. Efisiensi Alokasi Sumber Daya LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dalam menjalankan kegiatan sebagai institusi publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* yang erat kaitannya dengan efisien dan efektif. Efisien dalam penggunaan sumber daya yaitu penggunaan sumber daya secara minimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan efektif diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berhasil guna.

Sumber daya LRMPHP terdiri atas sumber daya manusia dan modal. Sumber daya manusia LRMPHP tahun 2025 terdiri atas 33 pegawai yang terdiri dari 19 PNS, 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 11 orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan jabatan fungsional LRMPHP memiliki 8 pegawai jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari instruktur madya sebanyak 1 orang, instruktur muda sebanyak 1 orang, instruktur pertama sebanyak 1 orang, analis pengelolaan keuangan APBN pertama 1 orang, pranata keuangan APBN mahir 1 orang, analis SDM aparatur pertama 1 orang, perencana pertama 1 orang, dan pranata humas pertama 1 orang. Jumlah pegawai jabatan fungsional umum LRMPHP sebanyak 13 orang petugas administrasi, terdapat penambahan 2 pegawai terkait adanya mutasi masuk ke LRMPHP. Adapun pegawai struktural LRMPHP sejumlah 1 orang yaitu Kepala LRMPHP. Dengan sumber daya manusia tersebut, capaian sejumlah 5 IKK dengan capaian berstatus biru (istimewa) yang berarti realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 5 IKK dengan capaian berstatus hijau (baik) yang berarti realisasi dapat memenuhi/ melampaui target $<110\%$ dengan skor kinerja sebesar 110,72% (dapat melampaui target).

Sumber daya modal antara lain terdiri dari sarana prasarana serta anggaran. Modal sarana prasarana LRMPHP terdiri dari gedung perkantoran LRMPHP yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti laboratorium, workshop, bengkel, dll. Modal berupa anggaran

berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh instansi pemerintah, dan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Adapun hasil perhitungan efisiensi anggaran LRMPHP berdasarkan pencapaian nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi MONEV Kemenkeu tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Nilai efisiensi anggaran LRMPHP tahun 2025

Pada TA 2025 diperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran LRMPHP sebesar 100 berdasarkan perhitungan aplikasi MONEV Kemenkeu dengan efisiensi SBK 100. Perhitungan nilai efisiensi erat kaitannya dengan nilai realisasi anggaran serta capaian rincian output (CRO). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran LRMPHP yaitu :

- 1) Pada perencanaan anggaran LRMPHP telah dilaksanakan review penganggaran secara berjenjang meliputi reuiu anggaran di tingkat Eselon I yang melibatkan Sekretariat BPPSDM KP, reuiu anggaran tingkat KKP yang melibatkan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal, serta reuiu tingkat K/L yang melibatkan DJA dan Bappenas;
- 2) Pada pelaksanaan kegiatan LRMPHP melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- 3) Pada pelaporan, pemantauan, dan evaluasi LRMPHP melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran dan kegiatan melalui aplikasi untuk pengukuran kinerja antara lain MONEV Kemenkeu, e-Monev Bappenas, OM SPAN Kemenkeu, dan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) KKP;
- 4) Terdapat penyesuaian pagu anggaran terkait dengan kebijakan pengalihan blokir anggaran dan penambahan belanja pegawai yang semula pagu LRMPHP Rp4.488.849.000,- menjadi Rp3.649.613.000,-. Selain nilai efisiensi dari aplikasi MONEV Kemenkeu juga diketahui nilai efisiensi anggaran untuk tiap-tiap indikator kinerja yang disajikan pada Tabel 33. Efisiensi anggaran diperoleh dari capaian kinerja dan realisasi anggaran tiap indikator kinerja. Dari 10 IKK terdapat 1 IKU dengan persentase efisiensi lebih dari 21% yaitu pada IKK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP dengan

efisiensi 24,08%, dengan realisasi kinerja 120% dan realisasi anggaran dukungan kegiatan kerjasama sebesar 95,92%. Kurang optimalnya realisasi anggaran karena terdapat sisa anggaran belanja bahan kegiatan magang.

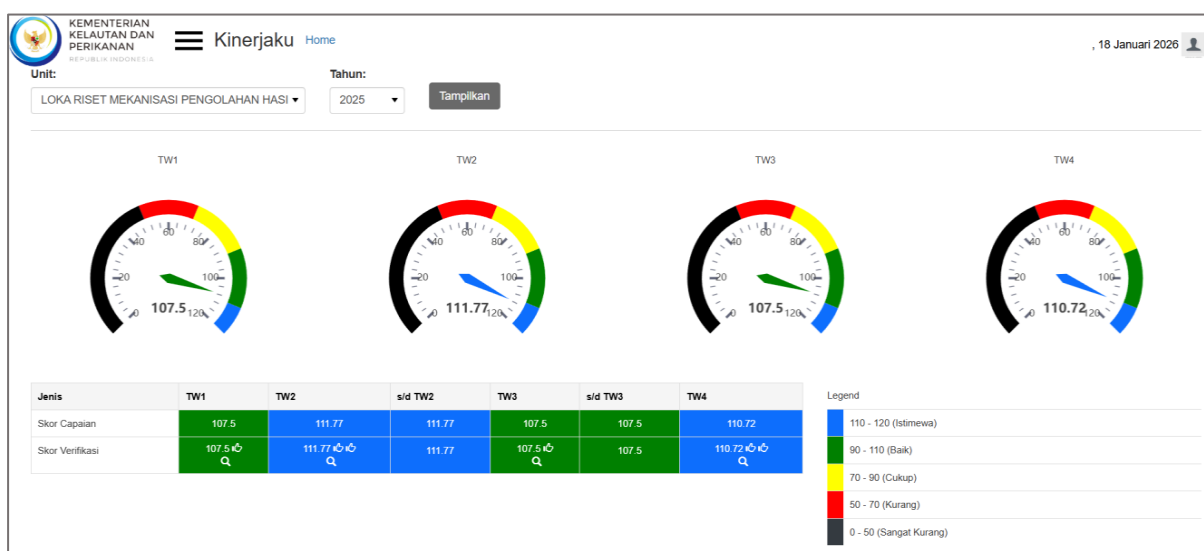
Tabel 33. Efisiensi anggaran indikator kinerja LRMPHP tahun 2025

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	100	5.454.000	5.449.000	99,91	0,09
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	108,51	300.000	300.000	100,00	8,51
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	104,38	200.000	199.650	99,83	4,55
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	120	100.000	100.000	100,00	20,00
5	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	113,82	200.000	200.000	100,00	13,82
6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	120	5.454.000	5.449.000	99,91	20,09
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	120	5.454.000	5.449.000	99,91	20,09
8	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	120	103.000	98.795	95,92	24,08
9	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100	3.632.246.000	3.595.145.560	98,98	1,02
10	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (Proposal)	100	102.000	98.795	96,86	3,14
Total Pagu Anggaran			3.649.613.000			

BAB IV PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pada tahun 2025, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Sekretaris BPPSDM KP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK LRMPHP pada Tahun 2025 berjumlah 10 IKK. Skor kinerja berdasarkan capaian volume/ output berdasar aplikasi Kinerjaku sebesar 110,72% (dapat memenuhi/ melampaui target). Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan IV dapat dilihat pada Gambar berikut.



Capaian LRMPHP pada Tahun 2025 yaitu 5 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 5 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi telah memenuhi/ melampaui target $<110\%$. Adapun rincian capaian 10 IKK tersebut yaitu:

SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- IKK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 85% (100%)
- IKK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai) dengan target 92,00 dan capaian 99,83 (108,51%)
- IKK 3. Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai) dengan target sebesar 80,00 dan capaian 83,50 (104,38%)

- IKK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai) dengan target sebesar 71,50 dan capaian 100 (120%)
- IKK 5. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks) dengan target sebesar 80,23 dan capaian 91,32 (113,82%)
- IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100% (120%)
- IKK 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRMPHP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian 97,50% (120%)
- IKK 8 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan) dengan target sejumlah 3 kemitraan dan capaian 4 kemitraan (120%)
- IKK 9. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 100% (100%)
- IKK 10. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (Proposal) dengan target 1 proposal dan capaian 1 proposal (100%)

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Pada tahun 2025 Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dapat memenuhi serta melampaui target kinerja yang diharapkan. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun anggaran mendatang. Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP dan Indeks Profesional ASN masih dapat dilakukan pengoptimalan capaian kinerja. Beberapa hal yang dapat diupayakan ke depan untuk meningkatkan nilai kinerja antara lain:

- Pengoptimalan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada komponen pengelolaan UP dan TUP dengan melaksanakan monitoring pengelolaan UP dan TUP supaya tidak terjadi keterlambatan.
- Pengoptimalan Indeks Profesionalitas ASN pada komponen kompetensi dengan memasukkan target Mengikuti diklat 20 JP pada SKP masing-masing pegawai dan pendampingan pegawai untuk memutakhirkan data secara mandiri pada sistem kepegawaian nasional (My ASN).
- Memanfaatkan kemitraan yang telah disepakati/ ditindaklanjuti sebagai *role model* untuk pelaksanaan transfer teknologi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRMPHP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRMPHP dan berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartika Winta Apriliany**

Jabatan : Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan

Kartika Winta Apriliany

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.488.849.000
Total Anggaran Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025		4.488.849.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan


Kartika Winta Apriliany



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartika Winta Apriliany**

Jabatan : Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Winta Apriliany

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.649.613.000
Total Anggaran Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025		3.649.613.000

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Winta Apriliany



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

JALAN IMOIRI BARAT KM 11.5 JETIS BANTUL - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KODE POS 55781 TELEPON (0274) 2810500

LAMAR www.mekanisasikp.web.id SURAT ELEKTRONIK mekanisasikp@kcp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 14 / KPA / LRMPHP / OT.210 / I / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)

LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2025

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);
- b. bahwa untuk mendukung SAKIP tersebut maka perlu menetapkan Surat Tugas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025.
- Dasar** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMBERI TUGAS

Kepada : (nama-nama terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 mempunyai tugas :
 - a. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025.
 - b. Ketua :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab.
 - c. Anggota :
 - 1) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
 - 3) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025.
3. Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan.

4. *Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.403834/2025 tanggal 2 Desember 2024 Kode Digital Stamp : 6703-5471-3445-9191;*
5. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Januari 2025

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



KARTIKA WINTA APRILIANY

Lampiran : Surat Tugas Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan Nomor
14 / KPA / LRMPHP / OT.210 / I / 2025

SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kartika Winta Apriliany, M.Dev. Pract.	Kepala LRMPHP	Penanggung Jawab
2	Nur Fitriana, STP	Penanggung Jawab Tata Operasional	Ketua
3	Afris Syahada, SE	Penanggung Jawab Tata Usaha	Anggota
4	Tri Nugroho Widiyanto, S.Si, M.Si	Penanggung Jawab Pelayanan Teknis	Anggota
5	Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
6	Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi, M.Sc	Perencana Ahli Pertama	Anggota
7	Naila Zulfia, S.Pi, M.Sc	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan

KARTIKA WINTA APRILIANY